

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

Sandra Anggita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389897&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN Persero. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normative ini mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada Bank BUMN dan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka konsep keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara tidak berlaku pada BUMN Persero.

ABSTRACT

The thesis examines wheter the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011 which states that the state-owned bank receivables is not the state-receivables provides certainty on the legal status of state assets in state owned bank; and wheter the concept of state finances as set out in the Law Number 17 Year 2003 regarding State Finance still applies to state owned enterprise limited. By applying the normative legal research approach, this thesis reveals that the Constitutional Court Ruling No. 77/PUU-IX/2011 provides certainty on the legal status of state assets in state-owned banks because the assets has been separated from the state finances; and that state finances concept as set out in Law No. 17 Year 2003 regarding State Finance does not apply to state owned enterprise limited.